

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
NANDANGKAH BUNTING DALAM ADAT SEMENDO
(Studi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Siti Nuraini
NPM: 1721010203**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
NANDANGKAH BUNTING DALAM ADAT SEMENDO
(Studi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Dr.Hj. Linda Firdawati,S.Ag., M.H

Pembimbing II : Eti Karini, S.H.,M.Hum

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Galang Tinggi menjalankan tradisi *Nandangkah Bunting* yang memang sudah menjadi tradisi masyarakat sejak dahulu. Dalam hal ini *Nandangkah Bunting* yaitu dari pihak wanita yang sudah menikah dengan seorang laki-laki mengunjungi atau menginap di rumah orang tua pengantin laki-laki dengan membawa bingkisan seperti makanan ringan maupun nasi beserta lauk pauk. Tradisi *nandangkah bunting* ini dilakukan setelah resepsi perkawinan. Tujuan dari tradisi *Nandangkah Bunting* ini adalah untuk mengakrabkan keluarga dari kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana praktik tradisi *Nandangkah Bunting* dalam adat semendo dan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tradisi *Nandangkah Bunting* dalam adat semendo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi *Nandangkah Bunting* dalam adat semendo dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Nandangkah Bunting* dalam adat semendo.

Metode dalam penelitian Ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh melalui dengan wawancara terhadap beberapa informasi yang sudah dipilih dan di tentukan oleh penulis. Sumber data: primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumentasi dan sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa praktik tradisi *Nandangkah Bunting* yaitu pengantin perempuan menginap ditempat orang tua mempelai laki-laki dengan diiringi keluarga inti dengan membawa sejumlah makanan yang berbentuk kue, nasi dan lauk pauk. Besok harinya kedua mempelai kembali ke rumah orang tua perempuan bersama dengan keluarga inti mempelai laki-laki, dan keluarga laki-laki membawa sejumlah makanan dan parabotan berupa kasur, bantal, niyu (tampah), bakul, piring, gelas dan lain-lain. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Nandangkan Bunting* dalam adat semendo diperbolehkan, karena terkait dengan tujuan, rukun dan syarat pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tetap mengikuti syariat-syariat Islam.

Kata Kunci: Adat Semendo, Hukum Islam, Tradisi *Nandangkah Bunting*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nuraini
NPM : 1721010203
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nandangkah Bunting* Dalam Adat Semendo (Studi Pada Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2021



Siti Nuraini
NPM: 1721010203



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nandangkah
Bunting Dalam Adat Semendo (Studi di Desa Galang Tinggi
Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan)**

**Nama : Siti Nuraini
NPM : 1721010203**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP: 197112041997032001**

**Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP: 197308162003122003**

Ketua Jurusan,

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP: 197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nandangkah Bunting Dalam Adat Semendo (Studi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**, disusun oleh Siti Nuraini , NPM 1721010203, Fakultas Syari'ah, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Rabu, 16 juni 2021.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.

Penguji II : Dr.Hj. Linda Firdawati, S.Ag. M.H.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khoiruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”
(QS An-Nur: 32).*



PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahku tercinta (Munasir) dan Ibuku tersayang (Asmiana), yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Adikku tersayang Ridho Saputra yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Siti Nuraini, Lahir di Sukaraja 20 juli 1999. Anak pertama dari dua bersaudara, dari perkawinan bapak Munasir dan ibu Asmiana.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan Pendidikan di MTs Nurul Iman Sekincau Lampung barat, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Sekincau Lampung Barat, dan lulus pada tahun 2017 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).



Bandar Lampung, Maret 2021

Siti Nuraini
NPM:1721010203

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NANDANGKAH BUNTING DALAM ADAT SEMENDO (Studi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)** . Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr.Hj. Linda Firdawati, S.Ag.,M.H., selaku pembimbing I, dan Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Tokoh Masyarakat Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekaku Ilir Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Wira Putri, Firdawati Heryadi Putri, Nur Ayni Jannah dan Rizca Yulyanti, yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman-Teman mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.



Bandar Lampung, Maret 2021

Siti Nuraini

NPM:1721010203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Islam	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	24
4. Akibat Perkawinan Dalam Hukum Islam	31
5. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	35
B. <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	40
1. Pengertian <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	40
2. Macam-Macam <i>Urf</i>	42

3. Syarat-Syarat <i>Urf</i>	44
4. Landasan Hukum <i>Urf</i>	45
C. Perkawinan Adat Semendo	47
1. Pengertian Perkawinan	47
2. Sistem Perkawinan	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Galang Tinggi	50
1. Sejarah Singkat	50
2. Keadaan geografi	51
3. Keadaan demografi	52
4. Kegiatan Ekonomi	53
B. Tradisi <i>Nandangkah Bunting</i> dalam Adat Semendo di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Tradisi <i>Nandangkah Bunting</i> dalam Adat Semendo di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	65
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Nandangkah Bunting</i> dalam Adat Semendo Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- 3.1 Data Jumlah Penduduk Desa Galang Tinggi
- 3.2 Data Jumlah Dusun Galang Tinggi
- 3.3 Data Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Galang Tinggi
- 3.4 Data Pernikahan Tahun 2020 Desa Galang Tinggi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Riset

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Daftar Nama Wawancara

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 7. Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nadangkah Bunting* Dalam Adat Semendo (Studi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.¹ Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.² Hukum ulama' ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasulnya tentang tingkah laku manusia muallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.³

¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 67.

² Hasby Ash-Shiddiqi. *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

³ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid I*. Cetakan Keenam (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 5.

2. Tradisi *Nandangkah Bunting*

Tradisi *Nandangkan Bunting* merupakan upaya untuk menyatukan dua buah keluarga setelah terjadinya perkawinan ataupun *walimatul ursy* di kediaman mempelai laki-laki yang sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang.⁴

3. Adat Semendo

Adat semendo adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah (daerah semendo). Apabila adat ini tidak dilaksanakan di anggap menyimpang.⁵

Berdasarkan uraian diatas bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nandangkah Bunting* Dalam Adat semendo (Studi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Membangun keluarga menjadi titik yang sangat strategis didalam membangun kehidupan berbangsa. Perkawinan merupakan wasilah yang diperbolehkan ajaran islam untuk melestarikan keberadaan manusia dimuka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari

⁴ Nusran, Desa Galang Tinggi, wawancara, mMaret, 2021.

⁵ Adi Susanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 2019, 58

pasangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at menuju kehidupan berumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁶ Islam mensyari'atkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁷ Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁸ Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqan galizan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.⁹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2010), 99.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta)

⁹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*.” Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut *Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*.¹⁰ Anwar Haryono dalam bukunya *Hukum Islam*, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.¹¹ Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal. Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

¹⁰ Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), 1.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung, 1977), 23.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S Ar-Rum:21)

Ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh ajaran Islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga sehingga dia betul-betul merupakan tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota keluarga yang ada.¹²Tradisi *Nandangkah Bunting* sudah ada di dalam adat semendo masyarakat desa Galang Tinggi yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi *Nandangkah Bunting* ini dilakukan setelah walimatul ursy (pesta perkawinan)..

Nandangkah Bunting yaitu pengantin perempuan menginap ditempat orang tua mempelai laki-laki) dengan diiringi keluarga inti dengan membawa sejumlah makanan yang berbentuk kue, nasi dan lauk pauk. Setelah tiba dirumah mempelai laki-laki kemudian keluarga kedua belah pihak suami dan isteri makan bersama. Esok harinya kedua mempelai kembali ke rumah orang tua perempuan bersama dengan keluarga inti mempelai laki-laki, dan keluarga inti laki-laki membawa sejumlah makanan dan parabotan berupa kasur, bantal, nihu (tampah), bakul, piring, gelas dan lain-lain sebagai bekal anak laki-lakinya untuk tinggal dirumah mempelai perempuan

Tujuan dari tradisi *Nandangkah Bunting* ini adalah untuk menyatukan atau mempererat silaturahmi keluarga dari kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Tradisi *Nandangkah Bunting* ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Di zaman sekarang

¹²Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya)

Nandangkah Bunting menjadi beban mental bagi setiap masyarakat yang akan melaksanakannya. Selain hal tersebut, tradisi *Nandangkah Bunting* ini tidak ada dalam Hukum Islam. Oleh karena itu inilah alasan penulis memilih judul penelitian berupa *Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Nandangkah Bunting dalam Adat Semendo (Studi Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya batasan masalah penelitian. Dengan adanya batasan masalah penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Pada penelitian ini dibatasi kepada *Tradisi Nandangkah Bunting dalam Adat Semendo di Desa Galang Tinggi, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendo ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendo ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendo.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendo.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendo yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang tradisi pada adat semendo sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Adi Susanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa adat tradisi dalam perkawinan masyarakat semende yaitu bantuan atau pemberian dari pihak mempelai laki-laki untuk bagok (resepsi Perkawinan), yang berupa seekor kerbau/sapi/kambing atau uang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak .¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Romli Dian Saputra yang berjudul “Makna Tradisi *Namat* Dalam Upacara Perkawinan Suku Semendo (Di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat). Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa Tradisi *Namat* merupakan rangkaian kegiatan yang terletak diakhir acara yang diseleggarakan. Dalam prosesnya, penganten diarak menuju tempat kediaman penganten wanita, setelah tiba dirumah mempelai wanita, barulah dilakukan *Namat* yaitu membaca Al-Qur’an yang dilakukan oleh kedua mempelai dan dilanjutkan Do’a yang diakhiri makan bersama.¹⁴

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Imam Mahdi yang berjudul “Pernikahan Dini Wanita yang Berstatus Pewaris Harta *Tunggu Tubang*” (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan). Dalam artikel ini dijelaskan bahwa *Tunggu Tubang* adalah istilah adat untuk menyebutkan anak perempuan tertua dalam keluarga

¹³ Adi Susanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 2019, 58

¹⁴ Romli Dian Saputra, “Makna Tradisi *Namat* Dalam Upacara Perkawinan Suku Semendo” (Skripsi, universitas Sriwijaya, 2018), 3

yang akan mewarisi harta kekayaan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, memang harta *Tunggu Tubang* (harta tua) berupa rumah, sawah dan kebun tidak dibagi menjadi hak kuasa anak perempuan tertua. Dan artikel ini menjelaskan tentang terjadinya pernikahan dini dikarenakan beberapa faktor antara lain: orang tua wanita ingin lebih cepat mewariskan harta *Tunggu Tubang*, agar ada yang membantu dalam pekerjaan fisik pengurusan harta warisan, wanita yang memegang status *Tunggu Tubang* sengaja sekolahnya dibatasi, karena kalau sekolah cukup tinggi orang tuanya takut anaknya tidak akan mau mewarisi harta tunggu tubang seperti orang tua mereka.

Beberapa penelitian yang telah telusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nandangkah Bunting* Dalam Adat Semendo. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi dan artikel tersebut di atas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat kasus itu terjadi. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Field Research* atau disebut juga dengan penelitian kaneah yaitu penelitian terhadap suatu kaneah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai

kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Penelitian lapangan ini adalah tentang Padangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nandangkah bunting* dalam Adat Semendo, maka penelitian ini dilakukan di Lokasi Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*¹⁶ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nandangkah bunting* Dalam Adat Semendodi Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai Tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendopada Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Desa Galang Tinggi.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Galang Tinggi khusus yang terlibat dalam tradisi *Nandangkah Bunting* yaitu berjumlah 11 pasang suami isteri yang sudah melakukan perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁸ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”.

¹⁷ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

¹⁸ *Ibid.* 81.

Yakni memilih responden yang benar-banar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 pasang suami istri teknik *purposive sampling*nya yaitu melihat latar belakang pendidikannya dan usia perkawinannya. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu Tokoh Agama dan Tokoh adat di desa Galang Tinggi.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendo di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹⁹ Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau Digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana bisa terjadinya tradisi *Nandangkah Bunting*.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁰

¹⁹*Ibid*, 73.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang pengertian tradisi *Nandangkah Bunting* dan praktik tradisi *Nandangkah Bunting*, kemudian identifikasi dan batasan penelitian yaitu, pada desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah maka diperlukan tujuan penelitian

serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta rukun dan syarat perkawinan.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran deskripsi objek penelitian Desa Galang Tinggi, dengan menguraikan sejarah singkat Desa Galang Tinggi, keadaan Geografis, keadaan Demografi dan keadaan ekonomi. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis dibab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan tinjauan penelitian penulis terhadap data yang didapat dilapangan. Praktik Tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendo serta Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendodi Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dengan tinjauan data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup, meliputi saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu (النكاح) *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²¹

Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²²

Dari pengertian di atas, perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus

²¹Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002), 1.

²²Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.²³

Pekawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghalizan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²⁴ Jadi perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki atau perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perkatan kekeraban dan ketetanggaan”. Menurut Hilman, Tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.²⁵ Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995) , 56.

²⁴ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 3.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni (Bandung, 1997). 70.

hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

1). Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum:21)

2). Firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertawakalah kepada allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturahmi).

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".(Q.S An-Nisa:1)

3). Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".(Q.S An-Nur:32)

4). Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau".(Q.S An-Nisa: 22)

Beberapa hadits yang berkaitan dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ بِمَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَنْكِحُوا ۚ فَإِنَّهُ أَغْضِلِلْبَصَرَ وَأَحْصِنُ الْفَرْجَ.
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الْجَمَاعَةُ رَوَاهُ

"Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya".(HR. Al-Jama'ah).

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan adat yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak membolehkan, maka dapat di katakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, karena ada tujuan mulia yang hendak di capai dalam perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda.

Hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina. Pada saat seperti diatas, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah dengan tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.

b. Sunnah

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran zina. dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam islam.

c. Makruh

Bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

d. Mubah (*ibahah*)

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibahah* inilah yang umumnya terjadi ditengah-tengah masyarakat luas,

dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan belum haram bila tidak nikah.²⁷

e. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunyapun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlanterlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.²⁸

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004), 91.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), 22.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 45.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. ²⁹Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah. Adapun rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:³⁰

- a) Laki-laki
- b) Jelas orangnya
- c) Beragama Islam
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon isteri, syarat-syaratnya:

- a) Islam
- b) Perempuan tertentu
- c) Baligh
- d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- e) Bukan seorang khunsa
- f) Bukan dalam ihram haji atau umroh
- g) Tidak dalam masa iddah
- h) Bukan isteri orang lain

3. Wali

²⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi. Cet-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 55.

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui". (Al-Baqarah:232)

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
- 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Wali dekat atau wali *qarib* (الولى القريب) yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.³¹

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

Wali jauh atau *wali ab'ad* (الولى الأبعد) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Telah dewasa dan berakal sehat
- c) Laki-laki
- d) Muslim
- e) Orang merdeka
- f) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*
- g) Berpikiran baik

- h) Adil
 - i) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.³²
4. Saksi, syarat-syaratnya:
- a) Berjumlah dua orang
 - b) Beragama Islam
 - c) Baligh
 - d) Orang yang merdeka
 - e) Laki-laki
 - f) Berlaku adil
 - g) Bisa mendengar dan melihat.
 - h) Memahami lafal ijab dan qabul
5. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.³³

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

³²*Ibid*, 76-78.

³³*Ibid*, 60.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

Faktor yang menentukan syarat sah perkawinan adalah mahar, sesuai dengan pendapatnya Ahmad Rofik, yang mengatakan bahwa mahar sebagai syarat sah nya mahar perkawinan juga merupakan bagian yang dirangkaikan dengan rukun dan syarat perkawinan. Kata mahar yang telah dibakukan menjadi bahasa indonesia berasal dari bahasa arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Adapun kata yang semakna dengan mahar adalah, *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba*, *'uqr*, *ala'iq*, *thaul*, dan *nikah*. Kata-kata ini dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin.

Secara istilah mahar diartikan sebagai “*harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul*”. Golongan hanabilah mendefinisikan mahar sebagai “*suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan dalam akad, atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan yang menyerupai nikah seperti wat'I syubhat dan wat'I yang dipaksakan*”.

Berbeda dengan kata-kata yang disebutkan pertama, (*al-shaduq*, *nihlah*, *faridha*, *ajr*) secara eksplisit diungkap didalam Al-

Qur'an seperti yang terdapat didalam surah an-Nisa: ayat 4 Dalam surah an-Nisa: 4 Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisa: 4)

Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an , sunah dan ijmak. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya perkawinan seperti yang telah dijelaskan Ibn Rusyd didalam Bidayah al Mujtahitnya.

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi mahar, dapat dibagi 2 mahar yang berasal dari benda-benda yang konkrit seperti dinar dan dihrum atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti membaca Al-Qur'an, bernyanyi dan sebagainya. Dari klasifikasi mahar itu dapat dibagi kedalam mahar musamma yaitu: mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri, dan mahar mistil yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah

diberikan kepada keluarga isteri seperti adik atau kakeknya yang terlebih dahulu menikah.

Didalam KHI, mahar ini di atur dalam pasal 30 sampai pasal 38, didalam pasal 30 dinyatakan:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisny disepakati kedua belah pihak”.

Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat dalam pasal 31 yang berbunyi:

“Penentuan mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran Islam”.

Walaupun mahar itu wajib namu dalam penentuannya tetplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan juga tidak boleh mengesankan asal ada atau apa adanya. Sehingga calon isteri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.

Syari’at mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
- b. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelinya

- c. Untuk menjadi pegangan bagi isteri bahwa perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
- d. Untuk pegangan dan pengikat kasih sayang antara suami isteri.

Jadi demikianlah pentingnya rukun dan syarat perkawinan merupakan dasar pelaksana perkawinan, begitu pula dengan mahar sebagai syarat syahnya perkawinan tetapi juga tidak memberatkan sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sebagai syarat sahnya perkawinan yang didasarkan pada perspektif Fiqh yang sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma.

4. Akibat Perkawinan dalam Hukum Islam

Ada beberapa akibat perkawinan dalam hukum Islam yaitu:

- a. Adanya Hak istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yang akan di jabarkan dalam sub bab ini yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga,serta memperlakukan istri dengan baik.

1) Mahar

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahinya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan

pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.³⁴

2) *Nafaqah*

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu tersendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir.

Adapun hukum membayar *nafaqah* untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.³⁵ Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai *nafaqah* adalah pangan, sandang, dan papan karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.³⁶

3) Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan

³⁴Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 31.

³⁵*Ibid*, 166.

³⁶*Ibid*, 169.

seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, istihadhah, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.

4) Memimpin dan Melindungi Keluarga

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab di atas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, karena suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)". (Q.S An-Nisa: 34)

5) Memperlakukan istri dengan baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram.

b. Adanya Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya yaitu:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.³⁷

c. Adanya Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dengan Anak

Dampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang menetapkan bahwa suami isteri wajib memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban terus berlangsung meskipun perkawinan mereka putus.

³⁷*Ibid*, 162-163.

Kewajiban tersebut tidak hanya kewajiban antara orang tua kepada anak, tetapi juga anak memiliki kewajiban kepada orang tua yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Sebaliknya apabila anak telah dewasa, wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia.³⁸ Dan tujuan perkawinan tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.³⁹ Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu dalam penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁴⁰ Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai sesok pemuas hawa nafsu kaum lakilaki untuk itu perkawinan merupakan pranata yang menyebabkan wanita dilindungi oleh suaminya. Manusia diciptakan Allah SWT di dunia memiliki naluri manusiawi yang harus mendapat pemenuhan.⁴¹ Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan

³⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002),75.

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2015), 30.

⁴⁰H.M.A Tihami, Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Depok : Rajawali Press, cet ke-3, 2013),15.
⁴¹Bandung : CV Pustaka Setia,) '*Fiqh Munakahat* ,Beni Ahmad Saebani'

naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk meyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk member saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya ulumuddin* tentang faedah melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Memenuhi hajat hidup manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguhsungguh untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴²

⁴²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, cet ke-4, 2002), 27.

Untuk mencapai tujuan suatu perkawinan orang Islam di Indonesia ada beberapa asas-asas hukum perkawinan diantaranya

- a. Asas Personalitas Keislaman Asas personalitas keislaman sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang dimaksud kepercayaannya sesuai dengan naluri manusia mengikuti agama yang dianutnya dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Asas Kesukarelaan Menurut Mohammad Daud Ali, kesukarelaan tidak hanya terdapat pada kedua calon mempelai melainkan kesukarelaan kedua orangtua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali merupakan unsur penting sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul.
- c. Asas Persetujuan Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal perkawinan sejak awal Islam sekitar abad ke-7 Masehi, dalam memilih pasangan perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan penerimaan atau tidak

peminangan seorang laki-laki.⁴³ Asas persetujuan ini dijabarkan menjadi beberapa asas diantaranya

- 1) Asas Kebebasan Memilih Pasangan Asas kebebasan memilih merupakan rangkaian dari asas kesukarelaan dan asas persetujuan.
 - 2) Asas Kemitraan Asas kemitraan dalam hukum Islam dapat dilihat dari subjek hukum atau seorang yang berakad nikah, yaitu suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh wali nikah. Mengenai hal diadakan, atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan suami istri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai akibat perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan kemitraan dalam keluarga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diikat dengan sigah ijab dan Kabul.
- d. Asas Monogami Terbuka Pada dasarnya perkawinan menurut hukum Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami diperbolehkan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri.
- e. Asas Untuk Selama-lamanya Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata.⁴⁴

Undang Undang menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan disesuaikan dengan perkembangan dan

⁴³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 100.

⁴⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 141.

tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang terdiri dari 6 asas kaidah hukum, sebagai berikut :

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan isteri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka artinya, jika suami tidak mampu berbuat adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup dengan satu orang isteri saja. Jika suami menginginkan isteri lebih dari satu harus memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian, dan perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat, untuk itu setiap permasalahan sebaiknya didiskusikan bersama antara suami dan isteri.⁴⁵

⁴⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 57.

Sedangkan hikmah dari perkawinan menurut Rahmat Hakim mengatakan bahwa pernikahan merupakan gerbang kehidupan yang wajar dan biasa dilalui oleh umumnya manusia.⁴⁶

- a. Menyambung silaturahmi, karena dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.
- b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar, sesungguhnya naluri sex merupakan naluri terkuat dan keras dalam kehidupan yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, jika jalan keluar tidak dapat memuaskan banyak sekali orang yang terjerumus pada lobang kehinaan.
- c. Menghindari diri dari perzinahan
- d. Estafeta amal manusia dan estetika kehidupan
- e. Menjaga kemurnian nasab.

B. *Urf* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Urf* dalam Islam

Secara bahasa kata *urf* berasal dari akar kata عشف-يعشف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik, yang dapat di terima akal sehat”, sesuatu yang di kenal atau berarti baik.

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 109.

Menurut para sahabat , *urf* dinamakan juga *adat* sebab perkara yang sudah di kenal itu berulang kali dilakukan manusia. *Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. *Urf* yang di maksud ada yang sesuai dengan ajaran islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama islam di sebut dengan adat.⁴⁷

Urf ialah sesuatu yang telah di kenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dan dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu saja, kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.⁴⁸

Adat adalah perkara yang berulang-ulang dan terus-menerus terjadi, yang bukan merupakan hubungan yang rasional. Ungkapan “perkara yang berulang-ulang dan terus menerus terjadi” menunjuk kepada segenap kadar cakupannya, yakni baik yang bersifat kolektif maupun individual, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat positif – konstruktif maupun yang bersifat negatif destruktif. Ungkapan yang merupakan hubungan yang rasional, seperti hukum kasualitas, hukum gravitasi, dan hukum perubahan energi.⁴⁹

⁴⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum islam*, (Jakarta: Rajawali Press,1996), 134.

⁴⁸ Agus Hermanto, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara,2017),50.

⁴⁹ Ahmad bin Ali al-Mubarak, *al-urf wa atsaruhu fi al-syari'ah wa al-qanun*, (Jakarta : Amzah,2011),162.

2. Macam-Macam *Urf*

a. Dari segi objeknya yaitu:

1). *Al-urf al-lafdzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan *lafadz* / ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. *Al-urf al-lafdzi* ialah *urf* yang berupa perkataan seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa di artikan dengan anak laki-laki saja. *Lahm*, menurut bahasa berarti daging termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

2). *Al-urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan. Yang disebut perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu memerlukan makanan atau minuman tertentu, memakai makanan tertentu dalam acara-acara khusus.

Urf ini ialah *urf* yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut syara' *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak

terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka *syara'* membolehkannya.

b. Dari segi cakupannya yaitu:

1). *Al-urf al-amm* adalah kebiasaan tertentu yang tidak berlaku secara luas di seluruh daerah.

2). *Al-urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat pada barang yang di beli dapat di kembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya pada barang itu tidak dapat di kembalikan.

c. Dari segi keabsahannya yaitu:

1). *Al-urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis). Tidak menghalangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula mambawa mudharat bagi mereka. Misalnya pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak calon isteri dan hadiah ini tidak di anggap sebagai maskawin.

2). *Al-urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang dengan imbalan sekian persen tertentu.

3. Syarat-Syarat *Urf*

Syarat-syarat dalam menggunakan *Urf* sebagai sumber Hukum, diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

- a. Tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah. Jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum *khamr*, riba, berjudi, jual beli *gharar* dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut. Jika ada suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami isteri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentanginya.
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama masih ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

⁵⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kenvana, 2010), 59.

4. Landasan hukum *urf*

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karya nya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan para ulama.⁵¹ Dalam Qur'an surat al-a'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf : 199)

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut dipahami oleh ulama ushul fiqh sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Selain ayat tersebut, *urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum juga didasarkan pada kenyataan bahwa syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi masa lalu.

⁵¹ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*, Lampung : Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017, 169.

Kedatangan islam bukan menghapuskan tradisi yang sudah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁵²

Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 6:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَأَطَهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”(Q.S Al-Maidah : 6)

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah

⁵² Ibid, 168.

diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.⁵³

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *Syara'* atau membatalkan hukum *Syara'*. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.⁵⁴

C. Perkawinan Adat Semendo

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut adat semendo adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun rumah tangga yang bahagia. Terhadap permasalahan perkawinan, hasil dari penelitian diketahui bahwa adat perkawinan secara umum dari suku semendo mencakup tiga hal yakni pra perkawinan, upacara perkawinan dan pasca perkawinan. Pusat upacara dilakukan di rumah pengantin perempuan. Pra perkawinan dimulai dari *kule kenanga* yang dapat disebut sebagai lamaran dari keluarga laki-laki datang menemui keluarga perempuan. Setelah itu *kekule kedebu*, dimana berkumpul calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menemukan *se-tunggal apit jurai* yakni merumuskan musyawarah

⁵³ Sucipto, “*Urf* Sebagai Metodologi dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, ASAS, Vol. 7. No. 1 (2015) : 30.

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani), 118-119.

kapan dilakukan upacara perkawinan. Setelah sampai waktunya perayaan perkawinan dilakukan dirumah mempelai perempuan. Adat perkawinan ini tidak mengenal jujur.

2. Sistem perkawinan

Perkawinan adat semendo menganut sistem matrilineal namun sistem ini mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak sama dengan daerah lain. Sistem kekerabatan dalam adat semendo dinamakan *lembaga Adat Semendo Meraje Anak Belai*. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga semendo adalah sama.⁵⁵ Selanjutnya dari hasil FGD lebih fokus dibicarakan mengenai adat perkawinan gadis *Tunggu Tubang*. Gadis *Tunggu Tubang* biasanya lekas kawin, baru akil baligh telah ada yang meminangnya. Langsung dikawinkan menurut keinginan orang tuanya. Biasanya yang melamar ialah pihak bujang. Kebanyakan orang tua gadis ingin lekas bermenantu, untuk membanntu bekerja supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan lain. Cepat atau lambatnya perkawinan tergantung pada musimnya, yaitu selesai musim kopi atau padi. Gadis *Tunggu Tubang* tetap laku walaupun kurang cantik, karena hartawati mempunyai harta pustaka yang jumlahnya tidak sedikit, asal bermenantu *Tunggu Tubang* mempunyai harta pustaka lengkap. Syarat utamanya mengawini seorang gadis *Tunggu Tubang* harus sanggup *Baguk* (kawin secara meriah). Jika keadaan mengizinkan mengangkat musik, Orgen Tunggal dari jauh umpamanya dari Palembang.

⁵⁵ Rina Antasari, "Keberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Hubungannya Dengan Nilai-Nilai Budaya Di Sumatra Selatan" *Sawwa*, Vol 9, No. 1, Oktober 2013

Persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengawini gadis *Tunggu Tubang* yakni: menikah menurut ajaran agama, mengisi *Tubang*(perabot rumah tangga) dengan barang yang selengkap-lengkapannya, parbiye seekor kerbau, sanggup mengerjakan sawah, menurut pemerintahan dalam *Jurai*, patuh kepada *Meraje*, sanggup berkorban moril, dan materil. Perimbangan jiwa, suara, harta benda kerjasama. Inilah yang disebut sama harga, laki-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak membeli . kata semendo terdiri dari dua suku katan *seme* dan *endo*, *seme*=sama, *endo*=harga, semendo= sama harga.

Laki-laki (bujang) mengawini gadis *Tunggu Tubang* dengan sendirinya menemui harta pusaka isterinya akan tetapi tidak berkuasa dan menjadi rakyat di keluarga isteri. Pertimbangan anak-anaknya menjadi tanggungan isterinya. Inilah istilah ambil anak. Kehidupan dijamin oleh pihak isteri dari sinilah susunan masyarakat semendo menurut garis keibuan. Dalam lingkup rumah tangga suami isteri mempunyai peran masing-masing. Seorang isteri dituntut untuk; mengurus rumah tangga, taat kepada suami, mendidik anak, menjaga kesucian dan kerahasiaan suami saat suami berkebun, melayani suami, meneruskan dan menjaga warisan dan menjaga diri. Sebagai seorang suami dari suku masyarakat suku semendo akan dituntut sebagai; pemimpin rumah tangga, menvari nafkah keluarga, mendidik anak, membantu orang tua dan mertua, memberi contoh teladan bagi keluarga, mengayomi *Apit Jurai*, menunggu rumah dan kebun/sawah, memelihara harta *Tunggu Tubang*, mengembang adat, tidak boleh berpoligami/mendua kn *Tunggu Tubang*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Hadis Riwayat. Al-Jama'ah

Hadis Riwayat. Al-Bukhari (no.5090) Kitab an-Nikah

Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

B. Buku/Literatur

Abdul Aziz Muhammad, Azzam, *Fiqh Munakahat*), Jakarta: Amzah, 2009.

Ahmad, bin Ali al-Mubarak, *al-urf wa atsaruhu fi al-syari'ah wa al-qanun* Jakarta: Amzah, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ash-Shiddiqi, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Cholid, Narbuk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni ,Bandung, 1977.

Hakim, Abdul Hamid , *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hermanto, Agus, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017.

Idris, Ramulyo Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Indra, Ridhwan, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* ,Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* ,Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Peneltian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta, ACAdemia, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet,I, 1995.
- Romli, Dian Saputra,"Makna Tradisi Nemat Dalam Upacara Perkawinan Suku Semendo" Skripsi, universitas Sriwijaya, 2018.
- Sidik. Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2011.
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susanto, Adi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2010.
- Ummu, Ibrahim Ilham, Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, butir 4.a

Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 3.

D. Jurnal

Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 19 No. 1, Mei 2018

Ahmad Atabik, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* . Vol.5 2, Desember 2014.

Dedi Sumanto, "Hukum adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 17, No. 2, Juli-Desember 2018.

Rina Antasari, "Keberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Hubungannya Dengan Nilai-Nilai Budaya Di Sumatra Selatan" *Sawwa*, Vol 9, No. 1, Oktober 2013

Sucipto, "*Urf* Sebagai Metodologi dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol. 7. No. 1, 2015

E. Wawancara

Dika Mindrawati, "Pelaku Tradisi *Mbesan*", *Wawancara*, Maret 25, 2021.

Nusran, Desa Galang Tinggi, *Wawancara*, Maret, 2021.

Ratih Purnawati, "Pelaku Tradisi *Nandangkah Bunting*", *Wawancara*, Maret 25, 2021.

Restiawati, "Pelaku Tradisi *Nandangkah Bunting*", *Wawancara*, Maret 26, 2021.

Sadirman, Desa Galang Tinggi, *Wawancara* , Maret, 2021.

Siti Maro'ah, "Pelaku Tradisi *Nandangkah Bunting*", *Wawancara* , Maret 25, 2021.

Wahyuni, "Pelaku Tradisi *Nandangkah Bunting*", *Wawancara*, maret 26, 2021.